

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN OBJEK WISATA  
PANTAI PANJANG DI KOTA BENGKULU  
PROVINSI BENGKULU**

FERLIANTI AZRELIA

NPP 30.0416

*Asdaf Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu*

*Program Studi Studi Kebijakan Publik*

Email : ferliantibkl@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Nur Ichsan Amin, S.H, M.Si

**ABSTRACT**

**Problems/Background (GAP):** *The implementation of this local government policy needs to be re-evaluated to see what factors are obstacles and challenges in the development of Panjang Beach tourist attraction in Bengkulu City and what steps will be chosen by the Government in managing and organizing Long Beach tourist attraction so that it can develop into a leading tourist attraction. **Purpose:** to analyze and describe policy implementation, inhibiting and supporting factors and local government efforts in developing Panjang Beach tourist attraction in Bengkulu City. **Method:** The research method used is descriptive qualitative research with data collection techniques carried out through observation, interviews and documentation. The research design used is Edward III's policy implementation theory, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. **Results:** The implementation of the Long Beach Tourism Development Policy in Bengkulu City, Bengkulu Province can be said to have been carried out well, but there are still several obstacles, namely the lack of clarity of information, lack of consistency, low human resource capacity, limited budget resources, insufficient equipment resources and the appointment of bureaucrats has not been maximized. **Conclusion:** As a form of government efforts in developing Long Beach tourism objects, things that must be considered by increasing tourism promotion, improving the quality of human resources and improving facilities and infrastructure.*

**Keywords:** *Policy implementation, Development, Tourism*

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Implementasi kebijakan pemerintah daerah ini perlu dievaluasi kembali untuk melihat faktor apa yang menjadi hambatan dan tantangan dalam pengembangan objek wisata Pantai Panjang di Kota Bengkulu serta langkah apa yang akan dipilih oleh Pemerintah dalam mengelola dan menata objek wisata pantai panjang sehingga dapat berkembang menjadi objek wisata unggulan. **Tujuan:** untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan, faktor penghambat dan pendukung serta upaya pemerintah daerah dalam pengembangan objek wisata Pantai Panjang di Kota Bengkulu. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan teknik

pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Desain Penelitian yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. **Hasil/Temuan:** Implementasi Kebijakan Pengembangan objek wisata Pantai Panjang di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dapat dikatakan telah terlaksana dengan baik namun masih terdapat beberapa kendala yaitu minimnya kejelasan informasi, belum konsistensi, rendahnya kemampuan sumber daya manusia, sumber daya anggaran terbatas, sumber daya peralatan belum mencukupi dan pengangkatan birokrat belum maksimal. **Kesimpulan:** Sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mengembangkan objek wisata Pantai Panjang maka hal yang harus diperhatikan dengan meningkatkan promosi pariwisata, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan sarana dan prasarana.

**Kata Kunci:** Implementasi kebijakan, Pengembangan, Pariwisata

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kota Bengkulu memiliki potensi wisata alam yang sangat menjanjikan jika dikelola dan diperhatikan dengan baik oleh pemerintah daerah sehingga Kota Bengkulu harus mampu menemukan, memanfaatkan dan mengembangkan potensinya agar dapat melaksanakan pengembangan pariwisata yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu objek wisata yang menjadi primadona serta ikon dari destinasi wisata yang ada di Kota Bengkulu adalah objek wisata Pantai Panjang. Faktor yang menjadi daya tarik dari Pantai Panjang sendiri ialah keindahan panorama alam yang ditawarkan serta belum banyak adanya sentuhan dari tangan manusia sehingga masih terjaga keasriannya. Oleh karena itu, perlu dilakukannya pengelolaan dan pengembangan pariwisata.

Menurut (Suwanto, 2004:19), pengembangan kepariwisataan harus memiliki lima unsur pokok meliputi:

1. Objek dan daya tarik wisata
2. Prasarana wisata
3. Sarana wisata
4. Tata laksana / infrastruktur
5. Masyarakat / lingkungan

Dari pendapat tersebut beberapa unsur belum terpenuhi. Sehingga, Pemerintah Daerah Kota Bengkulu khususnya Dinas Pariwisata masih terus mengoptimalkan pengembangan dan pengelolaan objek wisata Pantai Panjang secara maksimal dan diperlukan semua kajian yang mendalam yaitu dengan melakukan penelitian terhadap sumber daya pendukungnya (Wardiyanta, 2006:47). Hal ini diperkuat oleh Peraturan daerah Kota Bengkulu Nomor 6 tahun 2016 tentang Kepariwisataan Daerah, mengamanatkan bahwa pemerintah kota, pejabat, dinas terkait, dan badan terkait mempunyai tanggung jawab dalam pengembangan pariwisata di Kota Bengkulu khususnya objek wisata Pantai Panjang. Pengembangan ini diharapkan mampu membantu dan mendukung wisatawan dalam berwisata, serta mewujudkan destinasi wisata di Kota Bengkulu lebih variatif. Selain itu pengembangan diharapkan mampu

meningkatkan pendapatan daerah khususnya pendapatan masyarakat setempat karena kunjungan wisatawan di Kota Bengkulu dapat memberikan kontribusi besar dalam perkembangan pariwisata.

### **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan objek wisata Pantai Panjang yakni kurangnya kualitas sumber daya manusia yang berkompeten untuk mewujudkan industri pariwisata yang handal, baik dari aparaturnya maupun dari masyarakat itu sendiri. Dana yang masih kurang juga menjadi permasalahan karena dalam implementasi kebijakan ini dana yang dianggarkan tidak mencukupi kebutuhan di lapangan serta akan berdampak pada sarana dan prasarana yang kurang mendukung untuk menjalankan pengembangan objek wisata Pantai Panjang.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

penelitian sebelumnya merupakan penjelasan singkat dari penelitian terdahulu yang memiliki isu masalah yang kurang lebih sama dengan penelitian yang sedang ditulis dan dijadikan acuan oleh peneliti sebagai referensi, penelitian tersebut kemudian dimasukkan dalam bagian deskripsi penelitian terdahulu dalam bentuk pencegahan agar penelitian dibuat tidak termasuk dalam pelanggaran plagiarisme.

1. Penelitian Mapahena et al (2021) yang berjudul Implementasi Kebijakan Pengembangan Objek Wisata Selat Lembeh Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan objek wisata Selat Lembeh Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung belum terlaksana dengan baik karena sulitnya menjalin komunikasi dengan masyarakat sekitar dalam hal kerjasama dalam pemeliharaan dan penunjang fasilitas pembangunan serta pelaksanaan kegiatan yang direncanakan.
2. Penelitian Delly et al (2019) yang berjudul Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu. Hasil Penelitian menjelaskan hasil implementasi kebijakan pengembangan pariwisata kawasan Pantai Panjang kota Bengkulu di Dinas Pariwisata kota Bengkulu dalam pengelolaan Pantai Panjang dalam Mewujudkan Program *Wonderfull Bengkulu 2020*.
3. Penelitian Tanod et al (2021) yang berjudul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Objek Pariwisata Alam Pantai Kombi di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara. Hasil Penelitian menjelaskan Sumberdaya manusia pengelola objek wisata milik desa belum memiliki kemampuan yang baik serta belum didukung dengan ketersediaan fasilitas penunjang dan anggaran untuk pengelola objek wisata menjadi lebih baik.

Beberapa aspek yang dilihat adalah objek penelitian seperti tujuan penelitian, metode penelitian dan teori yang digunakan. Hal ini sebagai acuan untuk bisa mengisi kekosongan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, adapun perbedaannya yakni hanya berfokus pada membenahan kawasan pariwisata pantai panjang dalam mewujudkan program *Wonderfull Bengkulu 2020* (Delly et al, 2019), hanya berfokus pada perbandingan pengelolaan objek pariwisata yang dikelola oleh pemerintah dan objek wisata milik pribadi (Tanod et al, 2021). Adapun konteks penelitian yang dilakukan penulis yakni menganalisa dan mendeskripsikan implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan objek wisata Pantai Panjang di Kota Bengkulu dengan menggunakan teori Edward III. Penelitian penulis memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu yakni terkait implementasi kebijakan pengembangan objek wisata Selat Lembeh (Mahapena et al, 2021) namun yang membedakan penelitian terdahulu menggunakan teori implementasi Van Meter dan Van Horn untuk mengukur implementasi kebijakan.

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan, faktor pendukung dan faktor penghambat, serta upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pengembangan objek wisata Pantai Panjang di Kota Bengkulu.

### **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan deduktif yaitu pendekatan yang diawali dengan adanya teori sampai dengan menguji data untuk membuktikan teori yang sudah ada (Tersiana, 2018). Dimana penelitian ini menggunakan teori model implementasi Edward III yang mengemukakan bahwa indikator yang digunakan untuk mengukur implementasi kebijakan terdiri dari Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi (Wirman & Ismarwan, 2008). Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk menentukan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yakni teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2008) sehingga diperoleh wawancara terhadap 10 orang yang kompeten dibidangnya. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan teknik analisis data yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang valid dan kredibel untuk menganalisis masalah dalam penelitian ini (Subagyo, 2015).

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Implementasi Kebijakan Pengembangan objek wisata Pantai Panjang**

Penulis menganalisis dan mengumpulkan data dengan menggunakan teori model implementasi oleh Edward III yang dapat menjelaskan permasalahan yang terjadi dalam implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan objek wisata Pantai Panjang di Kota Bengkulu dengan lokus penelitian di Dinas Pariwisata Kota Bengkulu dan Pantai Panjang. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh

Edward III yang didalamnya terdapat 4 (empat) dimensi yang digunakan untuk menilai implementasi, yaitu:

## **1. Komunikasi**

### **a) Transmisi**

Transmisi atau saluran komunikasi yang terjadi dalam implementasi kebijakan pengembangan objek wisata Pantai Panjang berjalan dengan lancar. Adapun saluran komunikasi antar pimpinan dalam bentuk rapat koordinasi dengan para *stakeholder* sering dilakukan untuk menyamakan persepsi sedangkan saluran komunikasi dari pimpinan ke masyarakat lewat Dinas Pariwisata dengan membentuk Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) yang beranggotakan masyarakat sekitaran kawasan objek wisata Pantai Panjang dimana Pokdarwis ini mempunyai tugas untuk melaksanakan SAPTAPESONA (Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah dan Kenangan).

### **b) Kejelasan**

Kejelasan informasi mengenai implementasi kebijakan pengembangan objek wisata Pantai Panjang sudah terlaksana yang baik oleh para pelaksana kebijakan namun masih terdapat sedikit kekurangan yaitu informasi yang datangnya terlambat dan sering berubah-ubah dalam rentang waktu yang dekat kepada para pengelola pariwisata sehingga menghambat kinerja dalam menentukan tindakan yang akan dilakukan guna untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

### **c) Konsistensi**

Bentuk konsistensi dalam pengembangan objek wisata Pantai Panjang yaitu menata fasilitas-fasilitas yang ada berdasarkan fungsinya masing-masing serta penyamaraan bentuk bangunan yang ada agar lebih tertata dengan rapi namun dalam pelaksanaannya dapat dikatakan tidak konsisten karena disetiap masa pemerintahan walikota yang menjabat memiliki standar kebijakan yang berbeda sehingga banyak terdapat bangunan yang belum selesai dibangun dan akhirnya terbengkalai.

## **2. Sumber Daya**

### **a) Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Pariwisata sebagai pelaksana kebijakan pengembangan objek wisata Pantai Panjang tidak ada yang mempunyai latar belakang pendidikan dari bidang kepariwisataan sehingga masih kurangnya kemampuan pegawai dengan tugas dan fungsinya di bidang pariwisata.

### **b) Sumber Daya Anggaran**

Sumber daya anggaran dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan objek wisata Pantai Panjang masih belum memadai. Dana yang dialokasikan untuk pengembangan pariwisata masih sangat terbatas.

### **c) Sumber Daya Peralatan**

Sumber daya peralatan atau sarana dan prasarana yang terdapat di objek wisata Pantai Panjang masih kurang dan belum mampu mencukupi kebutuhan wisatawan sehingga menjadi hambatan dalam pencapaian implementasi kebijakan.

d) Sumber Daya Kewenangan

Sumber daya kewenangan yang terjalin berdasarkan hubungan hierarki dimana terdapat hubungan horizontal dan vertikal antar pelaksana kebijakan secara organisasional sehingga berjalan dengan baik dan sesuai aturan.

**3. Disposisi**

a) Pengangkatan Birokrat

Pengangkatan birokrat yang sesuai dengan bidangnya masih belum maksimal karena kondisi dilapangan menunjukkan kualitas dan kemampuan pelaksana kebijakan masih kurang karena tidak memiliki latar belakang kepariwisataan.

b) Insentif

Insentif atau dana kompensasi khusus yang digunakan untuk memacu pegawai agar termotivasi untuk meningkatkan kinerja pegawai telah tersalurkan dan berjalan dengan baik berdasarkan peraturan yang ada agar tujuan pengembangan objek wisata Pantai Panjang dapat tercapai.

**4. Struktur Birokrasi**

a) Standar Operasional Prosedur (SOP)

Dinas Pariwisata Kota Bengkulu dalam melaksanakan kebijakan pengembangan objek wisata Pantai Panjang dan menjalankan tugasnya sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dan sudah berjalan dengan baik.

b) Fragmentasi

Fragmentasi atau penyebaran tanggungjawab pelaksanaan terkait implementasi kebijakan pengembangan objek wisata Pantai Panjang dapat dikatakan sudah baik karena Dinas Pariwisata Kota Bengkulu melakukan koordinasi dengan banyak pihak-pihak yang terkait untuk memaksimalkan pelaksanaannya dilapangan, dimana bentuk koordinasi yang dilakukan yakni dengan rapat koordinasi.

**3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan sampah di Kota Bengkulu**

**1. Faktor Pendukung**

a) Potensi Alam

Objek wisata Pantai Panjang memiliki potensi alam yang indah dan menjadi ikon Kota Bengkulu. Objek wisata ini perlu dikembangkan bertujuan untuk memberikan manfaat terutama bagi pelestarian, perlindungan dan pemanfaatan potensi wisata serta berdampak langsung bagi masyarakat yaitu terbukanya lapangan usaha yang menciptakan kesempatan pekerjaan baru serta mampu meningkatkan pendapatan bagi masyarakat.

b) Dasar Hukum

Dasar hukum dijadikan dasar pertimbangan dalam penyusunan perencanaan serta semua pelaksanaan standar dan sasaran sudah dilakukan dan sesuai dengan kebijakan yang ada dan dikelola dengan baik oleh Dinas Pariwisata Kota Bengkulu.

- c) Dukungan Pimpinan  
Dukungan pimpinan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan telah berjalan baik. Salah satu bentuk dukungannya yaitu adanya komitmen Walikota dan Wakil yang tertuang dalam visi dan misi agar berjalan sesuai dengan rencana.

## **2. Faktor Penghambat**

- a) Minimnya Aksesibilitas  
Minimnya akses karena letak geografis yang tidak strategis dapat menghambat keberhasilan kebijakan pengembangan pariwisata bisa diatasi apabila ada daya tarik tersendiri dari objek wisata tersebut untuk menarik minat para wisatawan mengunjungi objek wisata Pantai Panjang.
- b) Kurangnya Kualitas Sumber Daya Manusia  
Kurangnya kualitas sumber daya manusia karena tidak memiliki latar belakang pendidikan kepariwisataan sehingga tersebut diperlukannya pelatihan dan sosialisasi terkait pariwisata guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mencapai tujuan yang ingin dicapai
- c) Keterbatasan Sarana dan Prasarana  
Keterbatasan sarana dan prasarana merupakan dampak dari kurangnya anggaran sehingga tidak bisa mencukupi penyediaan dan menjadi kendala tersendiri bagi objek wisata untuk berkembang.

## **3.3 Upaya pemerintah Daerah Kota Bengkulu agar Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu berjalan dengan baik**

- 1. Meningkatkan Promosi Pariwisata  
Promosi pariwisata Pantai Panjang telah dilakukan secara modern tidak konvensional. Dinas Pariwisata memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam mendukung tugas dan fungsinya.
- 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia  
Para pegawai melaksanakan berbagai pelatihan teknis pariwisata untuk meningkatkan kemampuan individu masing-masing dalam bidang kepariwisataan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan bagi para pemimpin agar dan menambah keterampilan, wawasan, pengetahuan serta sikap dalam kepemimpinan aparatur.
- 3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana  
Pemerintah Kota Bengkulu khususnya Dinas Pariwisata masih mengupayakan yang terbaik dalam meningkatkan dan memperbanyak sarana dan prasarana yang ada di Pantai Panjang. Karena masih adanya keterbatasan anggaran maka dimulai dari hal kecil yaitu menjaga fasilitas yang telah ada serta melestarikan lingkungan sekitar pantai.

### 3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Objek wisata Pantai Panjang merupakan ikon Kota Bengkulu yang memiliki potensi alam yang unggul dan dapat memberikan manfaat apabila dikelola dan dikembangkan secara maksimal dengan standar kebijakan yang ada sesuai Peraturan Daerah Kota Bengkulu No. 6 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan kepariwisataan daerah. Peraturan daerah ini sendiri sebenarnya tidak hanya mengatur mengenai objek wisata Pantai Panjang tetapi keseluruhan yang terletak di Kota Bengkulu. Pada Pelaksanaannya implementasi kebijakan ini sudah berjalan dengan baik namun masih memiliki kendala seperti terletak di daerah yang kurang strategis sehingga menjadi salah satu faktor penghambat pengembangan pariwisata. Tetapi bisa diatasi apabila ada daya tarik tersendiri dari objek wisata Pantai Panjang untuk menarik minat para wisatawan. Daya tarik tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung sehingga dapat mencukupi kebutuhan wisatawan. Sama seperti halnya dalam penelitian Delly et al (2019) yang menyebutkan bahwa sumber daya finansial yang memadai dapat mengembangkan objek wisata Pantai Panjang dengan membangun fasilitas-fasilitas publik. Selain itu terkait dengan sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan masih belum sesuai antara kemampuan dengan tugas dan fungsi yang diemban dalam bidang kepariwisataan. Sama halnya dengan temuan penelitian Tanod et al (2021) yang menyebutkan sumber daya manusia pengelola objek wisata milik desa belum memiliki kemampuan yang baik serta belum didukung dengan ketersediaan fasilitas penunjang dan anggaran untuk pengelola objek wisata menjadi lebih baik.

## IV. KESIMPULAN

- Berlandaskan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan pengembangan objek wisata Pantai Panjang di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :
  1. Implementasi kebijakan pengembangan objek wisata Pantai Panjang telah dilaksanakan, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala. Hasil analisis dengan menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III. Terdapat empat dimensi yang menjadi penentu keberhasilan kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari keempat dimensi tersebut, masih ada beberapa dimensi yang belum terpenuhi.
    - a. Komunikasi  
Pada dimensi komunikasi yang terdiri dari tiga indikator yakni transmisi, kejelasan, dan konsistensi sudah berjalan dengan baik tetapi masih kurang. Dalam menyampaikan informasi sudah jelas namun masih terdapat keterlambatan informasi sehingga menghambat kinerja dalam pengembangan pariwisata. Konsistensi masih perlu ditingkatkan dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah.

b. Sumber Daya

Sumber daya terdiri dari empat indikator yakni sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, sumber daya kewenangan. Dimana pada dimensi ini sumber daya manusia belum sesuai antara kemampuan dan pekerjaan sehingga masih perlu ditingkatkan lagi pelatihan agar meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mengelola pariwisata. Kewenangan dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata sudah berjalan sesuai dengan hirarkinya perintah berasal dari pimpinan dan dilaksanakan oleh bawahan. Namun, pada indikator anggaran masih kurang memadai sehingga berdampak pada sarana dan prasarana yang belum mampu mencukupi kebutuhan para wisatawan.

c. Disposisi

Disposisi terdiri dari dua indikator yakni pengangkatan birokrat dan insentif. Birokrat yang diseleksi dan diangkat menjadi pelaksana kebijakan memang telah terseleksi dengan baik namun masih belum maksimal karena tidak mempunyai latar belakang pendidikan kepariwisataan sehingga diperlukan pelatihan untuk meningkatkan kualitas individu. Sebagai bentuk apresiasi dan meningkatkan semangat para birokrat dalam mengimpelentasikan kebijakan pengembangan pariwisata maka disalurkan dana insentif dengan baik agar terus bekerjasama mencapai tujuan yang ingin dicapai.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi terdiri dari dua indikator yakni standar operasional prosedur dan fragmentasi, masing-masing dari indikator telah berjalan dengan baik. Dalam melaksanakan Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata sudah sesuai dengan SOP yang berlaku dan bekoordinasi dengan instansi lainnya demi mencapai tujuan.

2. Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengembangan objek wisata Pantai Panjang yakni :

a. Faktor Pendukung

- Potensi Alam;
- Dasar Hukum;
- Dukungan pimpinan.

b. Faktor Penghambat

- Letak Geografis Tidak Strategis
- Kurangnya Kualitas Sumber Daya Manusia
- Keterbatasan Sarana dan Prasarana

3. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam pengembangan objek wisata pantai panjang yakni :

- Meningkatkan Promosi Pariwisata
- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
- Meningkatkan Sarana dan Prasarana

**Keterbatasan Penelitian:** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian, dimana peneliti hanya diberikan waktu 15 hari untuk mengidentifikasi permasalahan di lapangan serta membuat solusi akan permasalahan yang terjadi. Tidak hanya itu dikarenakan waktu penelitian yang singkat peneliti keterbatasan untuk mejangkau ruang lingkup penelitian yang lebih luas dalam mengidentifikasi permasalahan yang terkait implementasi kebijakan pengembangan objek wisata Pantai Panjang di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*):** Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan implementasi kebijakan pengembangan objek wisata Pantai Panjang. Hal ini diperuntukkan agar permasalahan yang ditemukan dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kebijakan pengembangan objek wisata Pantai Panjang di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Pariwisata Kota Bengkulu beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Delly, Faizal, & N. (2019). Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu. *Manajemen Publik & Kebijakan Publik*, 1 No 1, 29.
- Mapahena, M. I., & Pati, A. B. (2021). Implementasi Kebijakan Pengembangan Objek Wisata Selat Lembeh Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung. *Agri-Sosioekonomi*, 17 No 2.
- Subagyo. (2015). *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. PT Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. ALFABETA.
- Suwantoro, G. (2004). *Dasar-dasar Pariwisata*. ANDI.
- Tanod, L. M., Areros, W., & Londa, V. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Objek Pariwisata Alam Pantai Kombi Di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Tersiana, A. (2018). *Metode Penelitian*. Yuu.
- Wardiyanta. (2006). *Metode Penelitian Pariwisata* (2nd ed.). ANDI.
- Wirman, Syafril & Ismarwan, S. (2008). *Implementasi Kebijakan Publik Dan Etika Profesi Pamong Praja*. Alqa Prisma Interdelta.
- Peraturan Daerah Kota Bengkulu No. 6 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan kepariwisataan daerah